

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Bab I bagian pendahuluan, akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah bank pembangunan yang didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung pembiayaan pengembangan usaha daerah dalam rangka perencanaan pembangunan nasional (Supriyono & Herdhayinta, 2019). BPD menjadi bank yang hanya dapat membiayai kredit investasi jangka pendek dikarenakan BPD masih memiliki tingkat CAR yang relatif rendah dan porsi tabungan yang masih relatif kecil. Dimana bank sendiri dinyatakan sehat apabila memiliki rasio kecukupan modal (*CAR/Capital Adequacy Ratio*) di atas 8%. Sedangkan berdasarkan UU Republik Indonesia No.19 Tahun 2003, Bank Badan Usaha Milik Negara (Bank BUMN) adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu, Bank BUMN adalah bank-bank besar dan memiliki ruang lingkup yang lebih luas maka Bank BUMN mampu membiayai kredit investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998, usaha perbankan terdiri dari kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok pada bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, kedudukan bank BUMN dan BPD adalah sama yaitu merupakan bagian keuangan negara. Sehingga perlakuan yang dialami bank BUMN akan berlaku di BPD. Namun Bank BUMN dan BPD memiliki struktur yang berbeda dibandingkan dengan kebanyakan bank swasta lainnya. Seperti BPD yang mayoritas dimiliki oleh Pemda dan Bank BUMN merupakan milik pemerintah. BPD dan Bank BUMN keduanya memiliki peran sebagai *agent of development* hanya skala yang berbeda, untuk BPD berskala daerah sedangkan Bank BUMN untuk skala nasional.

Akan tetapi, meskipun BPD memiliki aset produktif terbatas dan hanya bisa membiayai investasi jangka pendek tetapi BPD memiliki kemajuan dalam distribusi kreditnya. Pertumbuhan penyaluran kredit atau pembiayaan Bank Pembangunan Daerah ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lain. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya pertumbuhan yang cukup signifikan penyaluran kredit BPD di tengah masa pandemi Covid-19, dimana tercatat bahwa pertumbuhan kredit BPD lebih tinggi dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada tahun 2020 (Suheriadi, 2020). Kredit BPD juga diperkirakan tumbuh seiring terkendalinya Covid-19 dan pemulihan kondisi ekonomi, khususnya kredit untuk UMKM yang menjadi pangsa pasar terbesar bagi BPD. Kinerja penyaluran kredit BPD pada 2022 diproyeksikan mampu melampaui raihan positif (Damara, 2022). OJK mengungkapkan Bank BUMN dan BPD menjadi pendorong pertumbuhan kredit untuk industri (Intan, 2021).

Namun, pada tahun 2015, pemerintah melakukan pemutusan izin penyaluran KUR bagi 26 BPD. Pada tahun yang sama, pemerintah mengizinkan BPD mengajukan diri untuk menjadi penyalur KUR dengan syarat memiliki *Non-Performing Loans* (NPL) di bawah lima persen dan membangun sistem online dengan perusahaan penjaminan (Lailaa & Kurniawati, 2018). Bank BUMN terus berupaya mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai inisiatif maupun sinergi dengan instansi atau lembaga lainnya (Rusli, 2020). Akan tetapi, pada tahun 2022, BPD mengalami penurunan dibandingkan dengan Bank BUMN dalam sisi ekspansi kredit. Dimana OJK mencatat penyaluran kredit perbankan per April 2022 telah tumbuh 9,1% secara *Year on Year* (YoY). Pertumbuhan itu ditopang oleh Bank BUMN dan bank umum swasta nasional dimana masing-masing tumbuh 9,62% YoY dan 9,83% YoY. Sedangkan BPD hanya mencatat kenaikan sebesar 5,82% YoY (Hutauruk & Mahadi, 2020).

Kondisi neraca bank yang lemah (seperti NPL yang lebih tinggi dan pertumbuhan simpanan yang lebih rendah) dapat menyebabkan kondisi ekonomi makro semakin melemah (Miyajima, 2020). Kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*) merupakan proksi dari risiko kredit bank, dimana semakin tinggi tingkat NPL maka akan semakin besar pula risiko kredit yang akan ditanggung oleh bank tersebut (Anwar *et al.*, 2019). Provisi NPL yang lebih tinggi akan berdampak negatif pada modal dan dapat mengurangi pinjaman tetapi juga akan meningkatkan risiko kredit bank, menurunkan biaya pendanaan, dan memungkinkan bank untuk meminjamkan lebih. Sedangkan simpanan adalah sumber utama dana pinjaman, maka dapat dikaitkan secara positif yang secara luas sejalan dengan pertumbuhan

kredit (Miyajima, 2020). Dilihat dari sisi daya saing, maka bank dengan kemampuan beroperasi secara lebih efisien dalam hal kemampuannya menggunakan sumber daya untuk menghasilkan output dinilai lebih unggul dalam meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan pinjaman kepada UMKM (Anwar *et al.*, 2019).

Dalam penelitian empiris, masih jarang ditemukan studi yang meneliti NPL dan pertumbuhan simpanan dalam satu literatur. Penelitian tentang NPL telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, namun ditemukan ketidak konsistenan dalam hasil penelitian yang diteliti. Diantaranya dalam penelitian yang dilakukan Miyajima (2020) dan Anwar *et al.* (2019) menemukan bahwa NPL memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit, sedangkan penelitian Riadi (2018) menemukan bahwa NPL tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Demikian dengan penelitian pertumbuhan simpanan yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu juga ditemukan ketidak konsistenan dalam hasil penelitian yang diteliti. Dalam penelitian Miyajima (2020) menemukan bahwa pertumbuhan simpanan berpengaruh positif terhadap pemberian kredit, sedangkan pada penelitian Tehulu (2020) menemukan bahwa pertumbuhan simpanan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kredit. Sementara itu, penelitian ini ingin menguji pengaruh NPL dan pertumbuhan simpanan terhadap pertumbuhan kredit UMKM berdasarkan struktur kepemilikan pemerintah sehingga menetapkan objek penelitiannya bank yang bertindak sebagai *agent of development* dari pemerintah yaitu pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pentingnya melakukan pengujian pada objek ini karena beberapa tahun terakhir terjadi krisis ekonomi baik secara nasional maupun

internasional yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut memerlukan peran pemerintah, salah satunya melalui BPD dan Bank BUMN yang bertindak sebagai *agent of development* dan hal ini sesuai dengan kesenjangan yang muncul dari literatur-literatur terdahulu.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memilih judul dalam penulisan penelitian adalah: **“Pengaruh *Non-Performing Loans* dan Pertumbuhan Simpanan Terhadap Pertumbuhan Kredit dengan Struktur Kepemilikan sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan kredit pada BPD dan Bank BUMN mengalami kondisi naik turun yang kurang stabil.
- b. Pengaruh NPL berdampak pada pertumbuhan kredit.
- c. Pengaruh pertumbuhan simpanan berdampak pada pertumbuhan kredit.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan pada *Non-Performing loans* dan pertumbuhan simpanan sebagai variabel independen sedangkan pertumbuhan kredit sebagai variabel dependen dengan struktur kepemilikan sebagai variabel moderasi. Ruang lingkup dalam penelitian ini mengambil sampel bank-bank pemerintah (Bank Pembangunan Daerah dan

Bank BUMN) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2020-2022.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari masalah tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah NPL berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit pada bank-bank pemerintah?
2. Apakah pertumbuhan simpanan berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit pada bank-bank pemerintah?
3. Apakah struktur kepemilikan memoderasi pengaruh NPL terhadap pertumbuhan kredit pada bank-bank pemerintah?
4. Apakah struktur kepemilikan memoderasi pengaruh pertumbuhan simpanan terhadap pertumbuhan kredit pada bank-bank pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari beberapa masalah yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh NPL terhadap pertumbuhan kredit pada bank-bank pemerintah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan simpanan terhadap pertumbuhan kredit pada bank-bank pemerintah.
3. Untuk mengetahui apakah struktur kepemilikan memoderasi pengaruh NPL terhadap pertumbuhan kredit.

4. Untuk mengetahui apakah struktur kepemilikan memoderasi pengaruh pertumbuhan simpanan terhadap pertumbuhan kredit.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai NPL dan pertumbuhan simpanan yang mempengaruhi pertumbuhan kredit pada bank-bank pemerintah (BPD dan Bank BUMN).

2. Bagi Perusahaan

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat membantu memberikan informasi bagi perusahaan dalam pengambilan kebijakan dan manajemen terkait NPL dan pertumbuhan simpanan dalam pertumbuhan kredit.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari hasil penelitian ini, diharapkan peneliti selanjutnya mendapatkan informasi tambahan dan dapat menjadikan bahan referensi penelitian yang berkaitan dalam masalah penelitian ini.